

Modal Manusia, Sosial, Upah, dan Kesejahteraan: Kasus Pekerja Usaha Kecil dan Menengah

Nurlina Tarmizi Muhyiddin ¹, , Bambang Bemby Soebyakto ¹, ,
Fauziah Asyiek ¹, , Aning Kesuma Putri ^{2,*}, , Idham Cholid ³, 
dan Liliana ¹, 

¹ Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, 30662, Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia

² Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

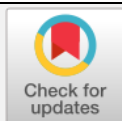
³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, STIE Multi Data Palembang, 30113, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, Indonesia

* Korespondensi: aning@ubb.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Tarmizi, N., Soebyakto, B. B., Asyiek, F., Putri, A. K., Cholid, I., & Liliana, L. (2021). Human Capital, Social, Wages, and Welfare: Case of Small and Medium Enterprise Workers. *Society*, 9(2), 624-642.

DOI: [10.33019/society.v9i2.283](https://doi.org/10.33019/society.v9i2.283)

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

ABSTRAK

Modal terdiri dari modal manusia, modal sosial, modal alam, modal fisik, dan modal keuangan, namun penelitian ini hanya akan membahas modal manusia dan modal sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara modal manusia dan modal sosial dalam mencapai kesejahteraan melalui tingkat upah dan pendapatan, khususnya bagi pekerja di sektor Usaha Kecil Menengah di Kota Palembang. Responden dalam penelitian ini adalah 400 pekerja di sektor Usaha Kecil Menengah di Palembang, di Kecamatan Sukarami, Ilir Barat I, Kalidoni, Seberang Ulu I dan Seberang Ulu II. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dalam analisis jalur (path analysis), dengan data primer berupa kuesioner wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minuman dan penghasilan maksimum pekerja berkisar antara Rp500.000 hingga Rp7.500.000, dengan rata-rata Rp1.903.041. Hasil analisis jalur menemukan bahwa modal manusia melalui upah mempengaruhi pendapatan sebesar 76,4 persen, dengan nilai beta 0,137 menunjukkan bahwa jika lama sekolah ditingkatkan 10 persen, upah akan meningkat 1,4 kali dan pendapatan sebesar 23,6 persen. Sebaliknya, hubungan modal sosial melalui upah terhadap pendapatan sangat kecil karena pengaruh faktor lain, seperti lingkungan kerja, tempat tinggal, dan lain-lain.

Dikirim: 14 Mei, 2021;
Diterima: 29 Juni, 2021;
Dipublikasi: 31 Desember, 2021;

Kata Kunci: Analisis Jalur; Modal Manusia; Modal Sosial; Pekerja UKM

1. Pendahuluan

Aset modal meliputi modal manusia, modal sosial, modal alam, modal fisik, dan modal keuangan, yang mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga dan kehidupan yang berkelanjutan melalui pendapatan atau upah individu (Al-Afeef, 2017). Aset modal yang melekat pada manusia disebut modal manusia, terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan migrasi (Krueger & Lindahl, 2001). Modal sosial mengacu pada kemampuan individu dan kelompok untuk bekerja sama dalam komunitas/kelompok atau antar kelompok (Arenius, 2014). Modal sosial dapat membantu meningkatkan kehidupan individu atau kelompok melalui jaringan atau kohesi sosial, yang mendorong iklim kerjasama untuk memperoleh manfaat (Yunus & Sakaria, 2017). Modal alam merupakan salah satu aset yang juga sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Misalnya, tanah yang subur, biota alam yang belum rusak atau tidak rusak akan sangat menguntungkan petani dan nelayan. Demikian pula modal fisik berupa prasarana, sarana, dan fasilitas dapat digunakan untuk mendukung kegiatan agar lebih produktif. Sedangkan modal finansial adalah modal yang dikuasai oleh pemilik (Mulder *et al.*, 2006; Birdsall *et al.*, 2014).

Semua aset modal digunakan untuk mencapai kesejahteraan, dimana indikator pencapaian setiap kelompok masyarakat berbeda-beda. Misalnya, dalam masyarakat agraris, indikator kesejahteraan petani diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP), yang mencerminkan rasio antara indeks harga yang diterima dan dibayar petani dalam persentase, jumlah panen per tahun, dan pengeluaran rumah tangga per kapita per bulan (Yokoyama & Ali, 2009; Badan Pusat Statistik, 2020).

Indikator kesejahteraan lainnya dapat diukur melalui ketersediaan pangan, kecukupan gizi, akses pangan, dan perilaku rumah tangga (Pinstrup-Andersen, 2009). Sementara itu, Badan Pusat Statistik (2020) juga menetapkan indikator kesejahteraan, yaitu: (a) tingkat pendapatan keluarga, (b) tingkat pendidikan keluarga, (c) tingkat kesehatan keluarga, (d) komposisi pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, dan (e) kondisi dan fasilitas yang dimiliki keluarga.

Kehidupan sejahtera yang diinginkan masyarakat adalah penghidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*), yaitu sejahtera di masa sekarang dan sejahtera di masa yang akan datang. Penghidupan berkelanjutan suatu komunitas mencerminkan kesejahteraan komunitas tersebut, baik sebagian atau bahkan seluruh komunitas (Schoonhoven-Speijer & Ruben, 2015; UNDP, 2017).

Lebih jauh lagi, pencapaian kesejahteraan tidak lepas dari gangguan yang dinyatakan sebagai *vulnerability context* (konteks kerentanan). Kerentanan tersebut antara lain: (a) terjadinya guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga-harga terutama harga kebutuhan primer, (b) guncangan politik, perubahan politik yang mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat, (c) bencana alam, yang mengubah struktur ekonomi, (d) persaingan tidak sehat yang disebabkan oleh perbedaan upah (Madhuri *et al.*, 2015). Maka untuk menghadapi kerentanan tersebut, pemerintah harus berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif, seperti menjaga stabilitas harga, stabilitas politik, dan menetapkan upah minimum kota, kabupaten, dan provinsi (Masud *et al.*, 2016).

Keberhasilan dalam meningkatkan kehidupan yang lebih baik diperlukan agar tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang menjadi komitmen

pemerintah Indonesia dapat berhasil. Sebagaimana diketahui, tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang (Morton *et al.*, 2017; Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2019).

Sejauh mana kesejahteraan dapat dicapai dapat dilihat dari pendapatan per bulan atau pendapatan rata-rata per anggota keluarga. Beberapa penelitian di Provinsi Sumatera Selatan menemukan bahwa pendapatan rata-rata kepala keluarga tergolong rendah. Penelitian oleh Tarmizi *et al.* (2014) menemukan bahwa rata-rata pendapatan bulanan kepala rumah tangga di Palembang adalah Rp2.185.575, di Lubuk Linggau Rp2.374.930, di Prabumulih Rp1.694.000, dan di Pagar Alam Rp1.023.437. Selain itu, penelitian Efrianti *et al.* (2018) di desa Pemulutan dan Sungsang, Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan hal yang tidak jauh berbeda: pendapatan rata-rata yang diterima kepala keluarga di desa Pemulutan dan Sungsang relatif rendah, Rp2.000.000,00.

Rendahnya pendapatan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, antara lain (a) jumlah anggota keluarga yang relatif besar, (b) ruang usaha yang masih terbatas, (c) mobilitas yang rendah terutama mobilitas untuk memasarkan hasil usahanya, (d) aset modal rendah. Tidak hanya berfokus pada keempat faktor di atas, (Muhyiddin *et al.*, 2017) meneliti lebih lanjut indeks dari masing-masing aset modal. Tiga aset modal dengan indeks rendah ditemukan: modal manusia, modal sosial, dan indeks modal keuangan kurang dari 0,5, sedangkan indeks modal fisik dan modal alam tinggi: 0,794 dan 0,961, masing-masing. Indeks yang tinggi bermanfaat bagi kehidupan. Indeks yang rendah merugikan kehidupan dan akan menghambat kehidupan yang berkelanjutan.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan fokus membahas human capital dan social capital terhadap pengupahan dan kesejahteraan pekerja pada sektor Usaha Kecil Menengah di Kota Palembang.

2. Studi Pustaka

2.1. Sustainable Livelihood

Sustainable Livelihood (SL) adalah konsep yang dikembangkan oleh Chambers & Conway (1992). Pendekatan SL merupakan alternatif dari pendekatan pendapatan per kapita. Pendekatan pendapatan per kapita tidak mencerminkan keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati oleh setiap anggota masyarakat. Bahkan pendekatan ini menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan antar individu dan antar kelompok masyarakat. Pendekatan ini tidak menyentuh masalah penghidupan yang berkelanjutan.

Ada lima komponen yang terkait dengan penghidupan berkelanjutan (Morton *et al.*, 2017; UNDP, 2017; Mkuna *et al.*, 2020), pertama, modal aset, yang terdiri dari modal manusia (*Human Capital* atau HC), modal sosial (*Social Capital* atau SC), modal alam (*Natural Capital* or NC), modal fisik (*Physical Capital* or PC) dan modal keuangan (*Financial Capital* or FC). Setiap komponen modal aset mempengaruhi yang lain dan tercermin dalam bentuk segi lima. Dengan demikian, konsep SL merupakan kerangka operasional yang menghubungkan keterkaitan antar komponen penghidupan.

Kedua, *vulnerability context* (kerentanan) (Madhuri *et al.*, 2015; Nissa *et al.*, 2019): seperti kenaikan harga, situasi politik yang tidak menguntungkan, bencana alam, persaingan tidak sehat. Ketiga, kebijakan dan kelembagaan (aturan, adat, kebiasaan, dan organisasi), seperti pemberian akses agar aset modal rakyat bertambah, kebijakan yang mengurangi kebiasaan yang tidak produktif, dan aturan yang menetapkan harga harus stabil dan tidak fluktuatif serta menghilangkan kerentanan. Keempat, *livelihood outcome*: kesejahteraan. Menurut ketentuan

Badan Pusat Statistik (2019), indikator kesejahteraan adalah pendapatan keluarga, pendidikan keluarga, kesehatan keluarga, komposisi konsumsi makanan dan bukan makanan, serta kondisi dan fasilitas yang dimiliki keluarga. Kelima adalah strategi untuk mencapai kesejahteraan.

2.2. Upah

Upah adalah balas jasa atau harga yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja. Upah diberikan berdasarkan pekerjaan (per hari atau minggu). Upah adalah kompensasi dalam bentuk materi (uang). Sebaliknya, bentuk kompensasi non-materi dinyatakan sebagai kompensasi non-upah, termasuk penyediaan fasilitas, biaya makan dan transportasi, serta pelatihan yang dapat menunjang karir. Upah pekerja juga merupakan pendapatan dalam kategori '*non labor income*'. Upah dalam berbagai kegiatan usaha 'seharusnya' didasarkan pada upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Tarmizi, 2012).

Ada beberapa teori pengupahan (Muhyiddin *et al.*, 2017): upah alami (*natural wages*), upah besi (*iron wages*), upah produktivitas batas kerja marginal (*revenue productivity theory of wages*), upah diskriminasi, upah *hedonic*, dan upah minimum. Upah alami ditentukan oleh penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar. Teori upah alami dikemukakan oleh David Ricardo (Ehrenberg, 2009); Upah alami adalah upah yang dijadikan acuan bagi pekerja untuk hidup layak. Upah pasar atau harga pasar tenaga kerja akan selalu, atau hampir selalu, cenderung ke arah minimum yang diperlukan untuk penghidupan pekerja.

Pengusaha menentukan upah besi, produktivitas batas kerja, dan upah non-diskriminatif. Teori upah besi dikemukakan oleh Ferdinand Lasalle (McConnell *et al.*, 2017); Upah besi adalah upah yang harus diterima oleh pekerja meskipun jumlahnya di bawah upah alami dan merupakan upah minimum. Hukum upah besi menegaskan bahwa upah riil selalu cenderung ke arah upah minimum dalam jangka panjang, dan upah minimum diperlukan untuk menopang kehidupan pekerja.

Teori upah produktivitas batas kerja pertama kali diperkenalkan oleh Thunnen, yang kemudian dikembangkan oleh Wicksteed, Walras, J. B. Clark (kelompok Neoklasik) (Ehrenberg, 2009). Teori ini menyatakan bahwa pekerja dibayar sesuai dengan kontribusi mereka terhadap produksi. Jika pekerja memberikan kontribusi besar pada produksi, mereka akan dibayar dengan upah yang lebih tinggi, dan jika kontribusi mereka terhadap produksi rendah, upah mereka akan turun.

Upah diskriminasi menunjukkan bahwa upah tidak sama bagi setiap pekerja meskipun tingkat pekerjaannya sama. Beberapa faktor penyebab perbedaan upah, antara lain perbedaan (a) jenis kelamin, (b) ras (warna kulit), (c) tingkat pendidikan, (d) tingkat keterampilan, (e) jenis pekerjaan (apakah pekerjaan yang berisiko atau pekerjaan yang aman) dan (f) serikat pekerja (Campos-Soria *et al.*, 2015; Mainali *et al.*, 2017).

Upah *hedonic* ditentukan oleh pemberi kerja dan penawar untuk layanan tenaga kerja. Penetapan upah oleh kedua belah pihak ini karena dihadapkan pada *trade-off* antara upah dan kenyamanan kerja (*job safety*) atau antara upah dan probabilitas cedera (*probability of injury*). Pekerja akan menolak bekerja jika kenyamanan kerja rendah atau kemungkinan risiko tinggi, dan penolakan ini akan membuat pengusaha menghitung ulang jumlah upah yang tepat (Masery, 2012; Tanojohardjo *et al.*, 2014).

Upah minimum adalah upah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan dengan Dinas Tenaga Kerja. Menurut International Labour Office (2010), upah minimum adalah upah minimum yang diwajibkan oleh pemberi kerja/pengusaha untuk membayar penerima upah atas pekerjaan yang dilakukan

selama periode tertentu yang tidak dapat dikurangi dengan kesepakatan bersama atau kontrak individu.

Penetapan upah minimum bertujuan (Widar, 2006; Maulida, 2013; Kawata, 2015): (a) menjaga pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, (b) melindungi tingkat pendapatan dan taraf hidup pekerja, (c) menjaga daya beli kekuatan pekerja. Mengacu pada tujuan ini, biasanya para penerima upah minimum mendapatkan ketenangan dalam bekerja. Namun ada yang berpendapat bahwa upah minimum tidak cukup kuat untuk menjaga daya beli pekerja. Untuk itu perlu dilakukan klasifikasi apakah upah minimum berada di bawah atau di atas upah pasar (upah aktual) sehingga dapat diketahui dampak positif dan negatif dari penetapan upah minimum.

Jika upah minimum di bawah upah pasar, ada kelebihan permintaan lebih besar dari penawaran. Sebaliknya, jika upah minimum berada di atas upah pasar, maka akan menguntungkan masyarakat. Karena dengan upah yang tinggi maka pekerja akan memiliki motivasi yang lebih tinggi dari sebelumnya dan selanjutnya akan meningkatkan produktivitas. Menurut Card & Allan (1994), sebagaimana dikutip dalam Ehrenberg (2009), kenaikan upah minimum akan membuat pengusaha melakukan tindakan yang merugikan pekerja, termasuk mengurangi jumlah pekerja.

Meski upah minimum rendah dan selalu di bawah upah sebenarnya, tetap saja diberlakukan. Fungsi upah minimum adalah sebagai jaring pengaman agar orang atau individu tidak jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih parah. Diharapkan, sebagai jaring pengaman, upah minimum harus menjadi moderator yang kuat dari hubungan antara modal aset dan kesejahteraan (Susanti, 2017).

Upah Minimum Provinsi (UMP) berbeda antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berbeda antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya, dan upah minimum sektoral provinsi berbeda antara sektor yang sama di provinsi yang berbeda. Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp3.043.111 per bulan. Angka tersebut tergolong rendah untuk kehidupan yang sejahtera karena tidak terpenuhinya kebutuhan sekunder dan tersier (Antiyatna *et al.*, 2016; Muhyiddin & Miskiyah, 2017).

2.3. Kesejahteraan

Kesejahteraan (yang termasuk dalam *Social Progress Index* (SPI) adalah indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk melihat tingkat kelangsungan hidup dengan menggunakan indikator pendapatan keluarga dan indikator proporsi konsumsi pangan dan non pangan. Jika pendapatan keluarga meningkat, berarti kesejahteraan keluarga akan meningkat. Apabila proporsi konsumsinya adalah konsumsi non-pangan lebih besar dari konsumsi pangan, berarti keluarga tidak lagi terganggu dalam mengejar kebutuhan pangan, dan selanjutnya berarti keluarga tersebut mengalami peningkatan kesejahteraan (Badan Pusat Statistik, 2019).

Dalam beberapa dekade, PDB (produk domestik bruto) telah menjadi primadona sebagai ukuran kesejahteraan. Pada dasarnya, PDB merupakan indikator kegiatan ekonomi agregat, tetapi juga selalu digunakan untuk mengukur kesejahteraan sosial. Sebagai alat ukur kesejahteraan, PDB memiliki keterbatasan, seperti yang dikemukakan oleh Zeder (2015), yaitu:

a) PDB tidak menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan

Distribusi pendapatan yang relatif merata menggambarkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Meskipun ini tidak termasuk dalam PDB.

- b) PDB tidak menggambarkan apa yang diproduksi
PDB mengukur nilai semua barang jadi dan jasa dalam suatu perekonomian dan tidak menentukan apakah produk yang termasuk dalam perhitungan PDB berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial, seperti produk obat-obatan.
- c) PDB mengabaikan eksternalitas
Pertumbuhan ekonomi biasanya berjalan seiring dengan peningkatan eksploitasi sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan. Penggunaan sumber daya yang berlebihan ini akan berdampak negatif, dan akibatnya kesejahteraan masyarakat akan menurun. Efek ini tidak termasuk dalam PDB sama sekali.

Berbagai kelemahan PDB mendorong upaya untuk mengembangkan indikator yang lebih akurat dan andal untuk mengukur kesejahteraan sosial, seperti IPM, SPI, dan GNHI (*the Gross National Happiness Index*) (Budiantoro *et al.*, 2013; Vikash, 2019). HDI, atau Indeks Pembangunan Manusia, mengukur keberhasilan pembangunan manusia melalui tiga dimensi: kesehatan dan harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup (pendapatan nasional bruto per kapita) (Grech *et al.*, 2020).

SPI (*Social Progress Index*) didasarkan pada tiga dimensi utama: kebutuhan dasar manusia, fondasi kesejahteraan, dan peluang. Kemajuan sosial untuk setiap dimensi diukur dengan banyak indikator, termasuk gizi, perawatan medis, keamanan (kebutuhan dasar manusia), pendidikan, kesejahteraan dan keberlanjutan (dasar kesejahteraan), hak pribadi, kebebasan, dan toleransi (peluang) (Jacobs & Slaus, 2010; Lumintang, 2015).

Kesejahteraan (termasuk dalam SPI) merupakan indikator yang digunakan oleh BPS untuk melihat tingkat kelangsungan penghidupan dengan menggunakan indikator pendapatan keluarga dan indikator proporsi konsumsi pangan dan non pangan. Jika pendapatan keluarga meningkat, berarti kesejahteraan keluarga akan meningkat. Misalkan proporsi konsumsi non-pangan lebih besar dari konsumsi pangan. Dalam hal ini berarti keluarga tidak lagi terganggu dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan selanjutnya berarti keluarga mengalami peningkatan kesejahteraan (Stiglitz & Sen, 2009).

3. Metodologi Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja sektor formal yang bekerja pada UKM (Usaha Kecil dan Mikro) di Kota Palembang yang berjumlah 450.930 orang (BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2018). Berdasarkan populasi, jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dan dengan tingkat kesalahan 5% (Durlauf *et al.*, 2020).

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{450930}{1 + 450930 (0,05^2)} = 400$$

Selanjutnya jumlah sampel sebanyak 400 orang dibagi sesuai dengan daerah terpilih dengan menggunakan *proportional random sampling* dengan rincian kecamatan dan sampel ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No.	Kecamatan	Penduduk yang Bekerja di Sektor Formal	Jumlah Sampel
1	Sukarami	116.114	103
2	Iilir Barat I	103.714	92
3	Kalidoni	82.295	73
4	Seberang Ulu I	78.913	70
5	Seberang Ulu II	69.894	62
Total		450.930	400

Sumber: Data diolah (2020)

3.2. Alat Analisis

3.2.1. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis penelitian ini menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*), yang memiliki tujuan sebagai berikut (Putri & Wulandari, 2020):

- Menerangkan mengapa variable-variabel berkorelasi dengan menggunakan model yang berurutan secara temporer.
- Menggambar dan uji suatu model matematika menggunakan persamaan yang mendasarinya dengan cara:
 - Mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu ke variabel lain yang dipengaruhi.
 - Menghitung pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen lainnya.

Metode analisis jalur (*path analysis*) yang dikembangkan oleh Sewell Wright pada tahun 1930-an merupakan metode yang mengkaji pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel yang dihipotesiskan sebagai akibat dari pengaruh perlakuan terhadap variabel tersebut (Gujarati, 2004). Dengan menggunakan itu dapat dihitung besarnya pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat.

Untuk analisis jalur (*path analysis*), hanya dua variabel yang mempengaruhi *sustainable livelihood* (SL) yang digunakan: modal manusia dan modal sosial. Dalam jangka pendek diasumsikan bahwa modal alam, modal fisik, dan modal finansial masing-masing individu tidak berubah secara signifikan. Kerentanan atau *vulnerability* tidak akan mempengaruhi aset modal. Hal ini disebabkan karena (a) sebagai pekerja, mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi fluktuasi harga, (b) tidak ada guncangan terhadap kondisi alam yang menyebabkan pekerja tidak bekerja, (c) tidak ada pengaruh langsung terhadap situasi politik, (d) tidak ada persaingan antar pekerja, dan jika ada persaingan antar pekerja tidak akan berdampak langsung pada pekerja, dan (e) meskipun ada pandemi COVID-19 selama penelitian ini dilakukan tidak membuat pekerja mengurangi jam kerjanya. Dengan demikian kerentanan diasumsikan *ceteris paribus* (Lautze & Raven-Roberts, 2003; Madhuri *et al.*, 2015; UNDP, 2013).

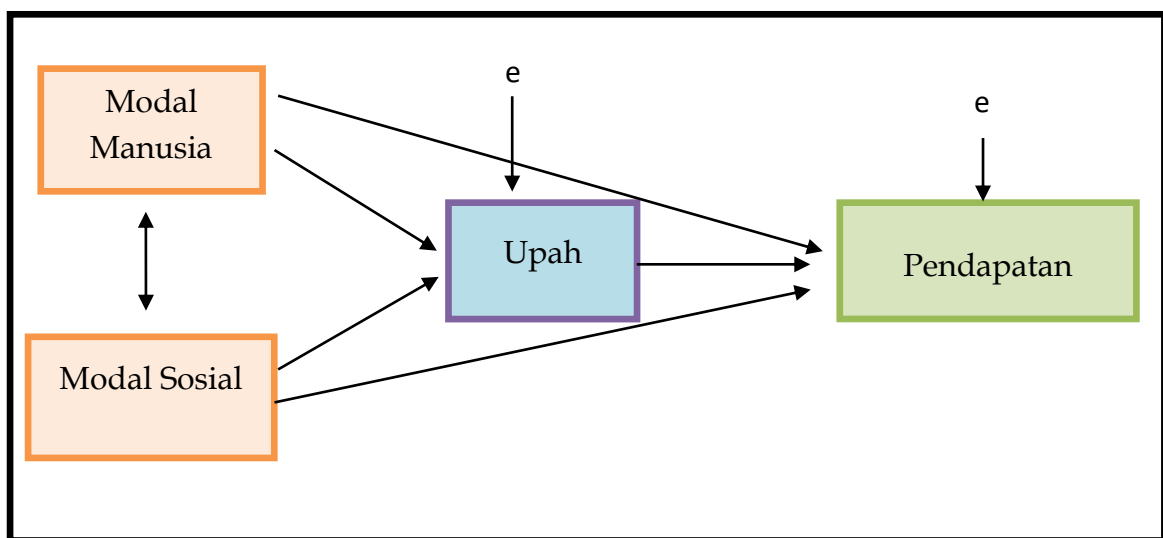
Hubungan antara modal manusia dan modal sosial dengan kesejahteraan adalah melalui upah yang diterima oleh pekerja. Kesejahteraan diukur dengan tingkat pendapatan yang diterima. Efek ini tercermin sebagai koefisien jalur yang merupakan koefisien regresi standar (yakni β), di mana Y adalah pendapatan, CA terdiri dari modal manusia dan modal sosial, dan W adalah upah:

$$Y = \beta CA + \mu W + e$$

Asumsi analisis jalur (*path analysis*) adalah (Sarwono, 2011; Durlauf *et al.*, 2020): (a) Ada hubungan linier, kausal dan tambahan antar variabel, (b) semua kesalahan tidak berkorelasi dengan model lain, (c) hanya terdapat hubungan kausal satu arah dalam model, (d) pengukuran variabel menggunakan skala interval, (e) variabel yang diamati dan diukur tanpa kesalahan, dan (f) model diasumsikan benar, dengan memasukkan semua penyebab ke dalam model. Formula analisis jalur dan asumsinya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \rho_{CHC}HC + \rho_{SC}SC + \rho_{CW}W + \epsilon$$

Y adalah pendapatan, HC adalah modal manusia, SC adalah modal sosial, W adalah upah, dan ρ adalah koefisien jalur (*path coefficient*). Jika digunakan sebagai diagram analisis jalur, menjadi sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Analisa Jalur (*Path Analysis*) Penelitian

Sumber: diolah dari model persamaan (2020)

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Kesejahteraan Berkelanjutan

Dua indikator untuk mengukur kesejahteraan adalah indikator pendapatan dan pengeluaran keluarga untuk pangan dan non pangan (Moore, 2015). Jika pendapatan di atas pendapatan rata-rata, keluarga dikatakan sejahtera. Demikian pula suatu keluarga dikatakan sejahtera apabila konsumsi non pangan lebih besar dari konsumsi pangan karena keluarga tidak lagi terganggu dalam mengejar kebutuhan pangan (Murniningtyas & Endah, 2018).

Penelitian ini mengasumsikan bahwa pendapatan responden merupakan pendapatan keluarga karena sebagian responden menerima bantuan dari keluarganya (dari istri/suami, anak, dan orang tua). Hasil penelitian menemukan bahwa kisaran pendapatan keluarga sangat besar, mulai dari minimal Rp500.000 dan maksimal Rp7.500.000, dengan pendapatan rata-rata Rp1.903.042. Pendapatan rata-rata ini berada di bawah Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 sebesar Rp3.250.000, di bawah Upah Minimum Kota Palembang tahun 2020 sebesar Rp3.165.519. Dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh Pegawai Negeri

Sipil dengan pangkat/golongan 2a dengan masa kerja 0 tahun, yaitu Rp1.845.000 (kondisi tahun 2020), rata-rata Rp1.903.042 relatif baik. Namun, masih jauh dari standar upah minimum Kota Palembang.

Tabel 2. Pendapatan di atas Rata-Rata dan di bawah Rata-Rata Masing-Masing Kecamatan (%)

No.	Kecamatan	$\geq$ Pendapatan Rata-Rata	< Pendapatan Rata-Rata	Jumlah Responden
1	Sukarami	30,1	69,9	103
2	Ilir Barat I	45,8	54,2	92
3	Kalidoni	38,4	61,6	73
4	Seberang Ulu I	52,1	47,9	70
5	Seberang Ulu II	25,8	74,1	62
Total		37,04	62,95	400

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Tabel 2 menunjukkan bahwa responden pekerja UMKM di wilayah penelitian ini relatif kurang sejahtera karena 62,95% memiliki pendapatan di bawah rata-rata pendapatan Kota Palembang yaitu Rp3.165.519. Sehingga kondisi ini menggambarkan bahwa profil pekerja UKM di Kota Palembang cenderung kurang sejahtera. Meski demikian, para pekerja mensyukuri keadaannya karena bekerja dengan penghasilan lebih baik daripada menganggur tetapi tidak memiliki penghasilan.

4.2. Permasalahan Kerentanan

Selama penelitian ini, masalah yang secara nasional mengganggu aktivitas masyarakat khususnya pekerja adalah masalah pandemi COVID-19. Wabah ini berdampak besar pada semua lapisan masyarakat. Sektor yang terkena dampak buruk antara lain sektor UKM (Kecil dan Mikro). Banyak pemilik UKM yang bangkrut, namun banyak yang masih bertahan dengan mengambil langkah menyelamatkan usahanya dengan pekerja diliburkan secara bergiliran, mengurangi jam kerja, dan *shift* kerja. Tindakan yang paling umum dilakukan oleh pengusaha adalah mengurangi jam kerja, diikuti dengan *shift* kerja, diliburkan, dan inisiatif karyawan dengan membolos kerja (**Tabel 3**). Tindakan yang dilakukan pengusaha adalah memutus mata rantai virus corona dan menjalankan instruksi pemerintah dalam melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Tabel 3. Tindakan Pengusaha selama Pandemi COVID-19

No.	Kecamatan	Bolos	Diliburkan	Pengurangan Jam Kerja	Shift Kerja
1	Sukarami	1,96	6,86	77,45	13,73
2	Ilir Barat I	1,09	21,74	72,83	4,35
3	Kalidoni	5,48	15,07	57,53	21,92
4	Seberang Ulu I	10,00	34,29	32,86	22,86
5	Seberang Ulu II	1,61	6,45	80,65	11,29

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Dari temuan lapangan, pandemi COVID-19 kurang atau tidak berdampak pada pengurangan jam kerja. Tabel berikut menunjukkan jam kerja di setiap kecamatan (**Tabel 4**). Mengapa kurang berdampak pada jam kerja? Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah sebagian besar pekerja yang menjadi responden adalah pekerja muda. Diduga, mereka bekerja sebagai *secondary worker* (bukan *primary worker*) sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga menggantikan kepala keluarga, dan dianggap memiliki tanggung jawab terhadap keluarga.

Tabel 4. Interval Jam Kerja di Masing-Masing Kecamatan

No.	Kecamatan	4 - 8 Jam	9 - 15 Jam	> 15 Jam
1	Sukarami	2,91	88,35	8,74
2	Iilir Barat I	14,13	71,74	14,13
3	Kalidoni	16,44	83,56	0,00
4	Seberang Ulu I	17,14	82,86	0,00
5	Seberang Ulu II	37,10	62,90	0,00

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Meski 80 persen pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi aktivitas para pekerja UMKM, pertemuan dengan kelompok kerja, tetangga, dan pengajian relatif tetap (**Tabel 5**), kecuali di Kecamatan Kalidoni dan Seberang Ulu II. Pertemuan kelompok diadakan untuk menjaga dan meningkatkan modal sosial. Dampak positif dari pertemuan tersebut adalah mereka dapat mendiskusikan: (a) pekerjaan, (b) bagaimana meningkatkan pendapatan mereka, termasuk kemungkinan mencari peluang kerja sampingan, dan (c) bagaimana meningkatkan keterampilan kerja mereka, termasuk berpartisipasi dalam pelatihan sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Tabel 5. COVID-19 dan Pertemuan Kelompok

No.	Kecamatan	Mengadakan Pertemuan	Tidak Mengadakan Pertemuan
1	Sukarami	61.17	38.83
2	Iilir Barat I	55.43	44.57
3	Kalidoni	43.84	56.16
4	Seberang Ulu I	72.86	27.14
5	Seberang Ulu II	27.42	72.58

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Kerentanan lainnya adalah ketidakstabilan harga. Pengaruh harga terhadap konsumsi keluarga dan pendidikan keluarga (termasuk biaya bagi mereka yang masih sekolah) dan mobilitas pekerja. **Tabel 6**, **Tabel 7**, dan **Tabel 8** menunjukkan kerentanan harga terhadap konsumsi, pendidikan dan mobilitas.

Hampir semua pekerja menyatakan bahwa harga berpengaruh dan sangat mempengaruhi konsumsinya. Di antara kecamatan yang paling merasakan dampak perubahan harga terhadap konsumsi adalah Kecamatan Iilir Barat I dan Seberang Ulu I. Sedangkan pekerja di Kecamatan Sukarami bervariasi, persentase antara sangat berpengaruh dan kurang berpengaruh tidak berbeda jauh. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada pekerja yang dapat mengatasi pola konsumsi agar kenaikan harga tidak mengganggu konsumsinya. Untuk mendapatkan kejelasan, diperlukan penelitian lebih lanjut.

Kerentanan harga terhadap pendidikan kurang berpengaruh. Pertama, responden adalah pekerja yang telah menyelesaikan pendidikannya masing-masing. Kedua, sebagian besar responden masih muda, belum menikah dan tinggal bersama orang tua, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan dana pendidikan bagi anggota keluarga yang berusia muda lainnya.

Perubahan harga tidak mempengaruhi mobilitas pekerja, dan ini terjadi pada semua pekerja di semua kecamatan. Temuan ini berarti mobilitas pekerja tidak terganggu sebagai tanda aktivitas sosial masih berjalan. Lebih lanjut, modal sosial tetap terjaga dan diharapkan cukup kondusif untuk menjaga keberlangsungan kehidupan yang berkelanjutan.

Tabel 6. Kerentanan Harga terhadap Konsumsi

No.	Kecamatan	Pengaruh Harga terhadap Konsumsi (%)		
		Sangat Berpengaruh	Berpengaruh	Kurang Berpengaruh
1	Sukarami	34,7	29,7	35,6
2	Iilir Barat I	68,5	15,2	16,3
3	Kalidoni	56,2	35,6	8,2
4	Seberang Ulu I	67,1	24,3	8,6
5	Seberang Ulu II	51,6	30,6	17,7

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Tabel 7. Kerentanan Harga terhadap Pendidikan

No.	Kecamatan	Pengaruh Harga terhadap Pendidikan (%)		
		Sangat Berpengaruh	Berpengaruh	Kurang Berpengaruh
1	Sukarami	13,7	9,8	76,5
2	Iilir Barat I	20,7	21,7	57,6
3	Kalidoni	9,6	9,6	80,8
4	Seberang Ulu I	15,7	27,1	57,1
5	Seberang Ulu II	25,8	25,8	48,4

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Tabel 8. Kerentanan Harga terhadap Mobilitas

No.	Kecamatan	Pengaruh Harga terhadap Mobilitas (%)		
		Sangat Berpengaruh	Berpengaruh	Kurang Berpengaruh
1	Sukarami	10,8	37,3	52,0
2	Iilir Barat I	33,7	10,9	55,4
3	Kalidoni	23,3	31,5	45,2
4	Seberang Ulu I	20	24,3	55,7
5	Seberang Ulu II	27,4	27,4	45,2

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

4.3. Analisis Kuantitatif: Path Analysis

4.3.1. Modal Manusia dan Income

Modal manusia terdiri dari variabel pendidikan, kesehatan dan migrasi. Dalam penelitian ini, modal manusia dilihat dari pendidikan. Variabel kesehatan termasuk dalam pendidikan karena tingkat pendidikan dapat diselesaikan jika seseorang dalam keadaan sehat. Indikator pendidikan yang digunakan adalah lama sekolah (Schultz, 2003; McConnell *et al.*, 2017).

Hasil regresi menunjukkan bahwa modal manusia mempengaruhi pendapatan sebesar 76,4 persen ($R^2: 0,764$) dan 23,6 persen oleh variabel lain (eksogen). Hubungan antara modal manusia dan pendapatan signifikan ($0,006 < 0,05$). Koefisien beta sebesar 0,137 menunjukkan bahwa lama sekolah bertambah 10 kali lipat sehingga pendapatan akan meningkat 1,4 kali lipat. Selanjutnya secara statistik nilai *t*-tabel sebesar 1,966 lebih kecil dari *t*-hitung sebesar 2,737 yang berarti H_0 ditolak. Pada pengujian kesesuaian model diperoleh *F*-hitung sebesar 7,492 lebih besar dari nilai *F*-tabel sebesar 2,68, artinya hipotesis H_0 ditolak, sehingga terdapat pengaruh modal manusia (*human capital*) terhadap pendapatan berhubungan positif.

Tabel 9. Koefisien dan Signifikansi Modal Manusia dengan Pendapatan

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Standardized Beta Coefficient	<i>t</i> -count	Sig.	<i>F</i> -count
Pendapatan	Modal Manusia	0,137	2,737	0,006	7,492

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

4.3.2. Modal Manusia dan Upah

Pengaruh modal manusia terhadap upah hanya 20,5 persen. *R-squared* modal manusia pada upah lebih kecil dari *R-squared* modal manusia pada pendapatan. Perlu diketahui bahwa upah adalah hasil yang diterima per bulan sebagai imbalan atas waktu kerja, sedangkan pendapatan adalah pendapatan keluarga. Dalam penelitian ini, upah berkisar antara Rp300,00 - Rp3,500,00 dengan rata-rata Rp2,100,000.00.

Hasil regresi modal manusia dan upah menunjukkan: (1) nilai signifikansi 0,017 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05 (5%), (2) koefisien beta 0,117 yang artinya jika panjang pendidikan dinaikkan 10%, upah naik 1,17%, (3) koefisien jalur 0,795 yang berarti hubungan antara variabel eksogen dan upah adalah 76,4%.

4.3.3. Modal Manusia, Pendapatan, dan Upah

Pengaruh modal sosial terhadap upah hanya 19 persen. *R-squared* modal upah sosial lebih kecil dari *R-squared* modal pendapatan sosial. Hubungan antara modal sosial dengan pendapatan dan modal sosial dengan upah adalah signifikan.

Indikator modal sosial dalam penelitian ini terdiri dari (a) pengaruh lingkungan kerja, (b) tempat tinggal, (c) alumni, dan (d) indikator sosial lainnya seperti pengajian, hobi (Bronisz & Heijman, 2010; Tjahjono, 2017; Woolcock, 2001). Untuk menguji pengaruh modal sosial terhadap pendapatan, digunakan 3 indikator (a), (b), dan (c). Diantara 3 (tiga) indikator tersebut, tempat tinggal memberikan kontribusi 50% terhadap modal sosial, 25% terhadap pengaruh lingkungan kerja, dan 25% merupakan indikator alumni beserta indikator pengajian dan hobi.

Indikator modal sosial diperoleh dengan menggunakan data Likert dimana jawaban untuk setiap variabel terdiri dari: sangat tidak puas (1), tidak puas (2), cukup puas (3), puas (4)

dan sangat puas (5). Data dengan 5 jawaban merupakan data ordinal yang ditransformasikan ke dalam interval.

Tabel 10. Koefisien dan Signifikansi Modal Sosial dengan Upah

Variabel	Beta Coefficient	t-count	Sig.	F-count
Modal Sosial	0,139	2,776	0,006	7,707

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

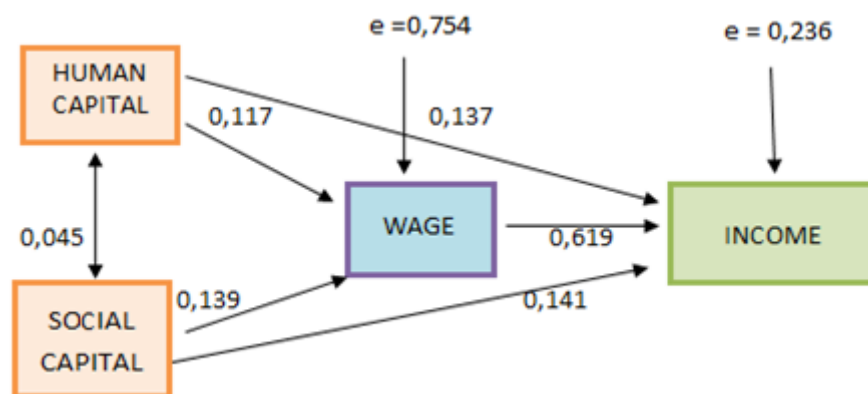
Tabel 11. Koefisien dan Signifikansi Modal Sosial dengan Pendapatan

Variabel	Beta Coefficient	t-count	Sig.	F-count
Modal Sosial	0,141	2,281	0,005	7,956

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

4.3.4. Human dan Social Capital terhadap dengan Intervening Upah

Diagram jalur modal manusia dan modal sosial melalui *intervening* upah dapat dilihat pada **Gambar 2**. Pengaruh modal manusia dan modal sosial terhadap pendapatan diperoleh dengan membandingkan nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yang diperoleh melalui upah. Misalkan nilai pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Dalam hal ini berarti variabel modal manusia dan modal sosial dapat di-*intervening*-kan (dihubungkan) dengan variabel terikat.



Gambar 2. Hasil Analisa Jalur (Path Analysis)

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Berdasarkan hasil perhitungan, terdapat pengaruh langsung modal manusia terhadap pendapatan sebesar 13,7 persen, artinya jika modal manusia meningkat sebesar 10 persen maka pendapatan akan meningkat sebesar 1,37 persen. Hal ini terjadi karena modal manusia tidak dapat secara langsung menyebabkan pendapatan meningkat, karena ada pengeluaran yang harus disisihkan dari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan menjadi fondasi kesejahteraan (Jacobs & Slaus, 2010; Lumintang, 2015). Pendapatan ini juga akan didistribusikan kembali untuk meningkatkan modal manusia dalam bentuk investasi atau tabungan untuk pendidikan dan kesehatan (Gibson, 2005; Tang *et al.*, 2021).

Berbeda jika modal manusia dikaitkan secara tidak langsung dengan pendapatan melalui upah. Pengaruhnya sebesar 61,9 persen, artinya ketika modal manusia meningkat 10 persen maka upah akan meningkat sebesar 1,17 persen bahkan pendapatan naik menjadi 6,19 persen.

Peningkatan modal manusia menunjukkan produktivitas pekerja. Misalnya, pekerja dengan pendidikan sarjana pasti akan memiliki upah yang lebih tinggi daripada pekerja dengan pendidikan sekolah menengah. Ketika upah pekerja berpendidikan S1 lebih tinggi daripada pekerja berpendidikan SMA, otomatis pendapatan mereka akan tinggi, dan mereka cenderung sejahtera karena dapat memenuhi kebutuhan pangan dan nonpangan dengan lebih baik (Bagliano et al., 2021; Jacobs & Slaus, 2010)

Pengaruh langsung modal sosial terhadap pendapatan sama kecilnya dengan pengaruh tidak langsung dari variabel penghubung upah. Hal ini terjadi karena tidak semua orang dapat membentuk komunitas sosial. Lagi pula, waktu luang pekerja UKM terbatas. Sekitar 80 persen waktu kerja mereka adalah 9 hingga 15 jam (Tabel 4), terutama di masa pandemi COVID-19. Terjadi pengurangan jam kerja (Tabel 3). Indikator modal sosial yang lebih berpengaruh terhadap pekerjaan adalah lingkungan hidup 50% dibandingkan lingkungan kerja (25%) dan lingkungan alumni, pengajian dan hobi (25%). Peningkatan modal sosial di lingkungan kerja, seperti pembentukan serikat pekerja, akan berdampak pada kesejahteraan pekerja UKM. Salah satu fungsi serikat pekerja yang paling berpengaruh di negara maju adalah menjaga upah minimum bagi pekerja (Bryson et al., 2011; Khan, 2016; McConnell et al., 2017).

5. Kesimpulan

Pengaruh langsung modal manusia terhadap pendapatan adalah 13,7 persen, yang berarti jika modal manusia meningkat sebesar 10 persen, pendapatan akan meningkat sebesar 1,37 persen. Hal ini terjadi karena modal manusia tidak dapat secara langsung menyebabkan pendapatan meningkat. Bagaimanapun, beberapa pengeluaran harus disisihkan dari pendapatan. Modal manusia terkait secara tidak langsung dengan pendapatan melalui upah, di mana pengaruhnya adalah 61,9 persen. Ketika modal manusia meningkat sebesar 10 persen, upah akan meningkat sebesar 1,17 persen, dan pendapatan akan meningkat menjadi 6,19 persen. Hal ini karena peningkatan modal manusia menunjukkan produktivitas pekerja. Pengaruh langsung modal sosial terhadap pendapatan sama kecilnya dengan pengaruh tidak langsung dari variabel penghubung upah. Hal ini terjadi karena tidak semua orang dapat membentuk komunitas sosial.

6. Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini merupakan hibah kompetitif yang didanai oleh Universitas Sriwijaya melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Program Penelitian Dosen Skema Unggulan Profesi bagi Guru Besar dengan Nomor Induk Dosen Khusus, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0683/UN9/SK.BUK.KP/2020. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sriwijaya dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Al-Afeef, M. A. (2017). Capital Asset Pricing Model, Theory and Practice: Evidence from USA (2009–2016). *International Journal of Business and Management*, 12(8), 182-192. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v12n8p182>
- Antiyatna, D. P., Muhyiddin, N. T., & Soebyakto, B. B. (2016). Pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 8–21. Retrieved from <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/article/view/8771>
- Arenius, P. (2014). Effects of Human Capital and Social Capital on Entrepreneurial Activity. *Babson College, Babson Kauffman Entrepreneurship Research Conference (BKERC), 2002–2006*. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1782232>
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. (2018). Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2018. Retrieved from <https://sumsel.bps.go.id/publication/2018/08/16/9ff85c81d7ec203517e09caa/provinsi-sumatera-selatan-dalam-angka-2018.html>
- Badan Pusat Statistik. (2019, November). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019: Infrastructure Development in Indonesia*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/28/27d78d49bc6aa22bd3672b59/indikator-kesejahteraan-rakyat-2019.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020, Agustus). *Laporan Perekonomian Indonesia 2020*. Diakses pada: <https://www.bps.go.id/publication/2020/09/16/be7568ad496829f35cea4b27/laporan-perekonomian-indonesia-2020.html>
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (2019). *Roadmap of SDGs Indonesia: A Hihglight*. 27–36. Retrieved from https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2019-07/ROADMAP OF SDGs INDONESIA_final draft.pdf
- Bagliano, F. C., Fugazza, C., & Nicodano, G. (2021). Life-cycle welfare losses from rules-of-thumb asset allocation. *Economics Letters*, 198. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2020.109655>
- Birdsall, N., Pinckney, T., & Sabot, R. (2014). Natural Resources , Human Capital , and Growth Natural Resources , Human Capital , and Growth. *Carnegie Endowment Working Papers, Number 9, February 2000*. Diakses pada: <https://carnegieendowment.org/files/natresources.pdf>
- Bronisz, U., & Heijman, W. (2010). the Relationship Between Social Capital and Regional Competitiveness in Poland. *Applied Studies In Agribusiness And Commerce*, 4(1-2), 43–48. <https://doi.org/10.19041/apstract/2010/1-2/5>
- Bryson, A., Ebbinghaus, B., & Visser, J. (2011). Introduction: Causes, consequences and cures of union decline. *European Journal of Industrial Relations*, 17(2), 97–105. <https://doi.org/10.1177/0959680111400893>
- Budiantoro, S., Fanggidae, V., Saputra, W., Ah, M., & Artha, D. R. P. (2013). Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia. *PRAKARSA Economic Policy Working Paper*, 2013. Retrieved from <https://repository.theprakarsa.org/media/667-multidimensional-poverty-index-mpi-konse-ee55542b.pdf>
- Campos-Soria, J. A., García-Pozo, A., & Sánchez-Ollero, J. L. (2015). Gender wage inequality and labour mobility in the hospitality sector. *International Journal of Hospitality Management*, 49, 73–82. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.05.009>

- Chambers, R., & Conway, G. R. (1992). Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century. *IDS Discussion Paper*, 296(January 1992). Retrieved from <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/775>
- Durlauf, S., Hansen, L. P., Heckman, J. J., & Matzkin, R. L. (2020). *Handbook of Econometrics* (Vol. 7). Amsterdam, Netherlands: Publisher of North Holland.
- Efianti, R., Marwa, T., Tarmizi, N., & Yuliana, S. (2018). Growth, Unemployment and Its Implication on Poverty: Empirical Study in Districts/Cities of South Sumatera Province. *Eurasian Journal of Economics and Finance*, 6(4), 27-37. <https://doi.org/10.15604/ejef.2018.06.04.003>
- Ehrenberg, R. G. (2009). *Modern labor economics: theory and public policy*. London: Pearson Education, Inc.
- Gibson, B. (2005). The transition to a globalized economy: Poverty, human capital and the informal sector in a structuralist CGE model. *Journal of Development Economics*, 78(1), 60-94. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.08.004>
- Grech, V., Cuschieri, S., Balzan, M., Grech, P., Fabri, S., Gauci, C. (2020). WITHDRAWN: Malta tourism losses due to second wave of COVID-19. *Early Human Development*, 105-208. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2020.105208>
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics (Fourth Edition)*. Newyork: McGraw-Hill Higher Education.
- International Labor Organization. (2010). *Pengupahan pekerjaan rumah tangga*, halaman 1-13. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_166260.pdf
- Jacobs, G., & Šlaus, I. (2010). Indicators of Economics Progress: The Power of Measurement and Human Welfare. *The CADMUS Journal*, 1(1), 53-113. Diakses pada: <http://cadmusjournal.org/node/11>
- Kawata, K. (2015). Work hour mismatches and on-the-job search. *Economic Modelling*, 47, 280-291. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.03.009>
- Khan, M. T. (2016). Social Role Of Labor Unions. *Science Vision*, Vol.14, Issue 1. Diakses pada https://www.researchgate.net/publication/305683581_SOCIAL_ROLE_OF_LABOR_UNIONS
- Krueger, A. B., & Lindahl, M. (2001). Education for growth: Why and for whom? *Journal of Economic Literature*, 39(4), 1101-1136. <https://doi.org/10.1257/jel.39.4.1101>
- Lautze, S., & Raven-roberts, A. (2003). *The Vulnerability Context: Is There Something Wrong With This Picture? Embedding vulnerability in livelihoods models: a work in progress*. September, 23-25. Boston: Feinstein International Famine Center, Tufts University. Retrieved from <https://www.alnap.org/help-library/the-vulnerability-context-is-there-something-wrong-with-this-picture>
- Lumintang, J. (2015). Pengaruh Perubahan Sosial terhadap kemajuan Pembangunan Masyarakat di Desa Tara-tara I. *E-Journal Acta Diurna*, 4(2), 1-4. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/7256/6759>
- Madhuri, M., Tewari, H. R., & Bhowmick, P. K. (2015). Livelihood vulnerability index analysis: An approach to study vulnerability in the context of Bihar. *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.4102/jamba.v6i1.127>
- Mainali, R., Jafarey, S., & Montes-Rojas, G. (2017). Earnings and Caste: An Evaluation of Caste Wage Differentials in the Nepalese Labour Market. *Journal of Development Studies*, 53(3), 396-421. <https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1189535>

- Masery, F. (2012). *Pekerja Terancam dalam Konteks Teori Upah Hedonik*. Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia VII, Jilid, 2 (2012) 914 - 921. Retrieved from https://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemVII/PKEM2012_3E2.pdf
- Masud, M. M., Kari, F., Yahaya, S. R. B., & Al-Amin, A. Q. (2016). Livelihood Assets and Vulnerability Context of Marine Park Community Development in Malaysia. *Social Indicators Research*, 125(3), 771–792. <https://doi.org/10.1007/s11205-015-0872-2>
- Maulida, Y. (2013). Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Migrasi Masuk Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, 21(02), 8687. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/8687-ID-pengaruh-tingkat-upah-terhadap-migrasi-masuk-di-kota-pekanbaru.pdf>
- McConnell, C. R., Brue, S. L., & Macpherson, D. A. (2017). *Contemporary Labor Economics (Eleventh Edition)*. Newyork: McGraw-Hill Education.
- Mkuna, E., Baiyegunhi, L., & Adamus, W. (2020). Sustainable livelihood alternatives among Nile perch (*Lates niloticus*) fishers in Lake Victoria Tanzania : analytical hierarchy process (AHP) approach. *Journal of Economic Structures*, Vol-9, Article number 32. <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00206-4>
- Moore, H. (2015). Global Prosperity and Sustainable Development Goals. *Journal of International Development*, Vol-27, Issue: 6, p.801-815. <https://doi.org/10.1002/jid.3114>
- Morton, S., Pencheon, D., & Squires, N. (2017). Sustainable Development Goals (SDGs), and their implementation. *British Medical Bulletin*, 124(1), 81–90. <https://doi.org/10.1093/bmb/ldx031>
- Muhyiddin, N. T., & Miskiyah, N. (2017). Rural urban linkages, fair trade and poverty in rural urban fringe. *European Research Studies Journal*, 20(2), 265–280. Retrieved from https://www.ersj.eu/repec/ers/papers/17_2_A_p16.pdf
- Muhyiddin, N. T., Sobri, K. M., Yunisvita, Liliana, & Farhan, M. (2017). Fertility, urbanization and underemployment. *European Research Studies Journal*, 20(4), 600–608. <https://doi.org/10.35808/ersj/914>
- Mulder, K., Costanza, R., & Erickson, J. (2006). The contribution of built, human, social and natural capital to quality of life in intentional and unintentional communities. *Ecological Economics*, 59(1), 13–23. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.09.021>
- Murniningtyas, A., & Endah, S. A. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: UNPAD Press. http://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-SDGs-di-Indonesia_compressed.pdf
- Nissa, Z. N. A., Dharmawan, A. H., & Saharuddin, S. (2019). Vulnerability Analysis of Small Fishermen's Household Livelihoods in Tegal City. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 11(2). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v11i2.18583>
- Pinstrup-Andersen, P. (2009). Food security: definition and measurement. *Food Security*, 1(1), 5–7. <https://doi.org/10.1007/s12571-008-0002-y>
- Putri, A. K., & Wulandari, A. (2020). Factors Influencing The Income Of Fishermen. *Integrated Journal of Business and Economics*, 4(2), 198. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v4i2.298>
- Sarwono, J. (2011). Mengenal Path Analysis: Sejarah, Pengertian Dan Aplikasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Ukrida*, 11(2), halaman: 285-296. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/98454-ID-mengenal-path-analysis-sejarah-pengertia.pdf>
- Schoonhoven-Speijer, M., & Ruben, R. (2015). Maintaining sustainable livelihoods: Effects of Utz certification on market access, risk reduction and livelihood strategies of Kenyan

- coffee farmers. *Coffee Certification in East Africa: Impact on Farms, Families and Cooperatives*, August 2012, 149–173. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-805-6_5
- Schultz, T. P. (2003). Human capital, schooling and health. *Economics and Human Biology*, 1(2), 207–221. [https://doi.org/10.1016/S1570-677X\(03\)00035-2](https://doi.org/10.1016/S1570-677X(03)00035-2)
- Stiglitz, J. E., & Sen, A. (2009). The Measurement of Economic Performance and Social Progress Revisited Reflections and Overview. *Documents de Travail de LOFCE*, 33(December 2009), 79. Retrieved from <https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01069384%0Ahttp://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2009-33.pdf>
- Susanti, E. (2017). Efektivitas Upah Minimum di Kabupaten Bandung. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i1.13566>
- Tang, L., Sun, S., & Yang, W. (2021). Investments in human capital: The evidence from China's new rural pension scheme. *Research in International Business and Finance*, 55, 101345. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101345>
- Tanojohardjo, G. A., Kunto, Y. S., & Brahmana, R. K. M. R. (2014). Analisa Hedonic Value Dan Utilitarian Value Terhadap Brand Trust Dengan Brand Satisfaction Sebagai Variabel Intervening Pada Produk Pewarnaan L ` Oréal Professionnel. *Jurnal Manajemen Pemasaran Petra*, 2(1), 1–11. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/131714-ID-analisa-hedonic-value-dan-utilitarian-va.pdf>
- Tarmizi, N. (2012). Ekonomi ketenagakerjaan. Palembang, Unsri Press.
- Tarmizi, N., Sobri, S. K. M., & Yunisvita, Y. (2014). Pengangguran Di Kota-Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Dan Kebijakan Mengatasinya. Call for Papers Seminar Nasional dan Silatnas IV FORDEBI, Dies Natalis Universitas Sriwijaya ke-54, hal 313-337. Retrieved from https://repository.unsri.ac.id/14524/2/16_Nurlima_FORDEBI-PENGANGGURAN_11_OKTOBER.pdf
- Tjahjono, H. K. (2017). Modal Sosial Sebagai Properti Individu: Konsep, Dimensi Dan Indikator. *JBTI: Jurnal Bisnis Teori Dan Implementasi*, 8(2), 184–189. <https://doi.org/10.18196/bti.82092>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2013, June). *Promoting Sustainable Livelihoods , Reducing Vulnerability and Building Resilience in the Drylands. Promoting Sustainable Livelihoods, Reducing Vulnerability and Building Resilience in the Drylands LESSONS FROM THE UNDP INTEGRATED DRYLANDS DEVELOPMENT PRO.* 82. Available at : <https://www.undp.org/publications/promoting-sustainable-livelihoods-reducing-vulnerability-and-building-resilience>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2017, July). Guidance Note: Application of the Sustainable Livelihoods Framework in Development Projects. page 1–22. Retrieved from https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research and Publications/Poverty Reduction/UNDP_RBLAC_Livelihoods Guidance Note_EN-210July2017.pdf
- Vikash, V. (2019). Human Development Index and Gross National Happiness Indices: A Conceptual Study. *Advances In Management*, 12(1), 62–63. <https://www.worldresearchersassociations.com/mngmntcurrissue/10.pdf>
- Widar, D. (2006). *Peranan Upah Minum dalam Penentuan Upah di Sektor Informal di Indonesia*. Jakarta: International Labour Organization. Diakses pada: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_123203.pdf
- Woolcock, M. (2001). The place of social capital in understanding social and economic

- outcomes. *Canadian Journal of Policy Research*, 2(1), 1–35. Available at <https://www.oecd.org/innovation/research/1824913.pdf>
- Yokoyama, S., & Ali, A. K. (2009). Social capital and farmer welfare in Malaysia. *Japan Agricultural Research Quarterly*, 43(4), 323–328. <https://doi.org/10.6090/jarq.43.323>
- Yunus, H. R., & Sakaria, N. (2017). Strengthening Social Capital to Enhance Participation In Public Sector. *Asian Journal of Applied Sciences*, 5(2), 376–382. <https://doi.org/10.24203/ajas.v5i2.4704>
- Zeder, R. (2015, January 28). Limitations of GDP as an Indicator of Welfare. Retrieved from <https://quickonomics.com/limitations-of-gdp-as-an-indicator-of-welfare/>

Tentang Penulis

1. **Nurlina Tarmizi Muhyiddin** memperoleh gelar Ph.D. dalm Ilmu Ekonomi dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2003. Penulis adalah Profesor pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
E-Mail: nurlinat@unsri.ac.id
2. **Bambang Bemby Soebyakto** memperoleh gelar Ph.D. dalm Ilmu Ekonomi dari Universiti Utara Malaysia pada tahun 2010. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
E-Mail: bambang@unsri.ac.id
3. **Fauziah Asyiek** memperoleh gelar Ph.D. dalam Ilmu Pertanian dari Universiti Utara Malaysia pada tahun 2009. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
E-Mail: fauzia@unsri.ac.id
4. **Aning Kesuma Putri** memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi dari Universitas Sriwijaya, Indonesia pada tahun 2010. Saat ini sedang menempuh studi doktor program studi Ilmu Ekonomi di Universitas Sriwijaya. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia.
E-Mail: aning@ubb.ac.id
5. **Idham Cholid** memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia, Indonesia pada tahun 2003. Saat ini sedang menempuh studi doktor program studi Ilmu Ekonomi di Universitas Sriwijaya. Penulis adalah dosen pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, STIE Multi Data Palembang, Indonesia.
E-Mail: idham@stie-mdp.ac.id
6. **Liliana** memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia pada tahun 2009. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia.
E-Mail: liliana@unsri.ac.id